



Pengaruh Konflik di Laut China Selatan terhadap Keamanan Maritim Indonesia

Muhammad Haikal Rama Putra^{1*}

¹Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: JL.Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Indah,Kec. Tamalanrea,Kota Makassar.
Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: haikalrama256@gmail.com*

Abstract. *The South China Sea (SCS) conflict is one of the most complex geopolitical disputes in the Southeast Asian region, involving not only claimant countries such as China, the Philippines, and Vietnam, but also impacting non-claimant countries such as Indonesia. Although Indonesia is not officially involved in the territorial claim dispute in the SCS, its geographical position close to the disputed area, especially around the Natuna Islands, places Indonesia in a strategic and vulnerable position. This journal discusses in depth Indonesia's position in the SCS conflict, highlighting how Indonesia maintains its territorial sovereignty without being directly involved in the conflict. In addition, the direct impact of the conflict on Indonesia's maritime security is also discussed, including increasing territorial violations, threats to local fishermen, and challenges in monitoring territorial waters. The conflict in the SCS also has an impact on regional stability and Indonesia's maritime economy, especially in the context of ASEAN cooperation and the world's maritime axis policy. Finally, this journal reviews various efforts made by Indonesia in maintaining its maritime security, such as strengthening diplomacy, modernizing defense equipment, and developing an integrated maritime policy. Through a qualitative approach and descriptive analysis, this journal aims to provide a comprehensive understanding of the dynamics of the SCS conflict and its implications for Indonesia's maritime security.*

Keywords: *South China Sea, maritime security, Indonesia, regional conflict, Natuna, regional stability, maritime diplomacy*

Abstrak. Konflik di Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu sengketa geopolitik paling kompleks di kawasan Asia Tenggara, yang tidak hanya melibatkan negara-negara pengklaim seperti Tiongkok, Filipina, dan Vietnam, tetapi pun berdampak pada negara non-pengklaim seperti Indonesia. Meskipun Indonesia secara resmi tidak terlibat dalam sengketa klaim wilayah di LCS, posisi geografisnya yang berdekatan dengan wilayah sengketa, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna, menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sekaligus rentan. Jurnal ini membahas secara mendalam posisi Indonesia dalam konflik LCS, menyoroti bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatan wilayahnya tanpa secara langsung terlibat dalam konflik. Selain itu, dibahas pula dampak langsung konflik tersebut terhadap keamanan maritim Indonesia, termasuk meningkatnya pelanggaran wilayah, ancaman terhadap nelayan lokal, dan tantangan dalam pengawasan wilayah perairan. Konflik di LCS juga berdampak pada stabilitas regional dan ekonomi maritim Indonesia, khususnya dalam konteks kerja sama ASEAN dan kebijakan poros maritim dunia. Terakhir, jurnal ini meninjau berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga keamanan maritimnya, seperti penguatan diplomasi, modernisasi alutsista, dan pengembangan kebijakan maritim terpadu. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, jurnal ini berfungsi sebagai memberikan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan konflik LCS dan implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia.

Kata kunci: Laut China Selatan, keamanan maritim, Indonesia, konflik regional, Natuna, stabilitas kawasan, diplomasi maritim.

1. LATAR BELAKANG

Laut China Selatan adalah kawasan maritim yang sangat strategis di samudra yang luasnya sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Wilayah ini juga adalah jalur pelayaran internasional yang penting, yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lebih dari sepertiga perdagangan dunia melewati jalur, 60% ekspor dan impor negara-negara di Asia Timur.

Laut China Selatan pun menyimpan berbagai macam sumber daya alam yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seperti halnya minyak bumi, gas, dst.

Konflik di Laut China Selatan seringkali menjadi sorotan publik seiring dengan kontroversi Tiongkok yang mengeluarkan statement: Sembilan garis putus putus yang termasuk hampir semua area LCS. Pernyataan tersebut berlawanan dengan pandangan berbagai negara yang terlibat seperti Vietnam, Filipina, Brunei dll.

Konflik ini makin memanas dengan perbuatan Tiongkok yang membuat pulau buatan meluaskan wilayahnya secara *de facto*, dan menghadirkan pasukannya di wilayah yang bersangkutan. Berbagai insiden dan konfrontasi di Laut China Selatan hingga gugatan hukum di mahkamah arbitrase internasional menjadi salah satu bukti keseriusan dari masalah ini.

Meskipun Indonesia bukanlah negara yang memiliki masalah secara langsung di LCS, Namun letak geografis dari Indonesia itu sendiri berbatasan dengan Laut China Selatan yang membuat Indonesia menjadi tempat yang sangat rentan untuk mendapat efek dari kejadian buruk pada Laut China Selatan. Pulau Natuna yang berlokasi di ujung ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kerap menjadi titik konflik bagi Indonesia karena banyaknya nelayan asing yang melewati daerah tersebut. Walaupun Indonesia menyatakan tidak memiliki permasalahan dengan Tiongkok, Tindakan provokasi di perairan Natuna membuat dunia bertanya tanya tentang kedaulatan dan keamanan Indonesia sebagai negara.

Dari pandangan geopolitik konflik memberikan *pressure* terhadap Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif. Indonesia harus menjaga hubungan dengan Tiongkok sebagai mitra dan juga menjaga harga diri dan kedaulatan sebagai negara yang berdaulat. Konflik ini memiliki dampak yang besar baik dalam hal diplomasi maupun militer dan ekonomi. Pemerintah di Indonesia sudah memulai banyak Langkah mulai dari patrol, Pembangunan infrastruktur keamanan hingga diplomasi di berbagai forum internasional. Konflik yang kompleks dan juga dinamika kekuatan global yang timpang juga menuntut untuk analisis yang lebih dalam sejauh apa konflik ini memengaruhi Indonesia. Memanas nya konflik di Laut China Selatan juga menunjukkan bahwa Indonesia harus bisa beradaptasi dengan dinamika dinamika keamanan regional yang terjadi di sekitarnya walaupun Indonesia itu sendiri bukan merupakan pihak yang secara langsung berkonflik dengan negara yang bersangkutan fakta bahwasanya salah satu daerah kedaulatan Indonesia yaitu daerah perairan Natuna seringkali berkonflik dengan klaim sepihak dari Tiongkok membuat Indonesia mau tidak mau harus mengambil Tindakan yang strategis dikarenakan hal ini mengancam kedaulatan dan juga keamanan maritim Indonesia itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan seberapa jauh masalah di Laut China Selatan dapat memberikan dampak ke Indonesia. Dengan latar belakang diatas analisis terhadap pengaruh konflik Laut China Selatan terhadap Indonesia menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang konkrit mengenai implikasi strategi, tantangan, serta opsi opsi yang dimiliki indonesia dalam menjaga kedaulatannya dan kepentingan nasionalnya itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis tentang pengaruh dari Konfrontasi Laut China Selatan terhadap Indonesia saya menggunakan teori keamanan nasional karena teori ini berhubungan langsung dengan topik yang akan saya analisis:

Teori Kemanan Nasional

Keamanan nasional merupakan suatu kewajiban untuk melindungi keamanan suatu bangsa atau negara dengan kekuatan militer, ekonomi serta kekuasaan politik dan keahlian bernegosiasi. Sebab sifat yang tidak mau kalah antara negara negara, keamanan nasional dengan negara yang memiliki jumlah sumber daya yang signifikan berdasarkan kepada perbuatan teknis dan proses pengerjaan. Hal ini berputar dengan melindungi pesan yang berurusan dengan dapur negara untuk kekuatan bagi militer sampai taktik berunding dengan lawan. Sebab itu wajib dilaksanakan bermacam cara untuk menjamin keamanan negara dapat terjaga. (Astarini, 2021). Karena itulah menjaga kemanan nasional tidak selalu terdependensi dari militer saja, melainkan membutuhkan adanya gabungan antara aspek aspek lain seperti diplomasi, ekonomi dll. Dalam permasalahan global yang semakin rumit, negara wajib untuk memiliki taktik yang mampu merespon ancaman ancaman baik bersifat militer atau non militer.

Indonesia sebagai negara maritim dengan posisi yang rawan harus bisa membangun pondasi keamanan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan geopolitik termasuk dengan masalah yang ada di Laut China Selatan.

Geopolitik Dan Geostrategis

Geopolitik dan geostrategi pertahanan berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk menganalisis tantangan keamanan di dunia global. Ketika dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung, memahami dinamika kekuatan, geografi, dan keamanan menjadi penting untuk menjaga kepentingan nasional dan menjaga stabilitas. (Sarjito, 2023) Geopolitik adalah studi tentang pengaruh geografis terhadap ilmu politik dan hubungan internasional,

sementara geostrategi itu sendiri adalah Analisa tentang kekuatan militer dan SDA nasional dapat di fungsikan untuk mencapai tujuan politik dan keamanan negara. Teori Geopolitik diambil berdasarkan pemahaman bahwasanya letak geografis suatu negara bisa memengaruhi kekuasaan dan kebijakan politik negara itu sendiri baik dari tingkat regional maupun ke tingkatan yang lebih luas. Daerah yang strategi seperti berada di jalur pelayaran internasional, memiliki akses terhadap sumber daya yang kaya ataupun berbatasan dengan negara besar cukup memberikan keunggulan strategis dalam sisi geopolitik dunia.

Geopolitik menjadi bahan analisa yang penting bagi setiap negara untuk memahami dinamika dinamika kekuasaan Kawasan strategis dunia. Sementara itu disisi lain; Teori Geostrategik, juga lebih memusatkan cara suatu negara menanggapi strategi baik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya berdasarkan faktor geografis. Dalam Teori Geostrategis geografi tidak hanya dilihat sebagai suatu pembagian wilayah melainkan sebagai elemen dalam menentukan strategis dalam diplomasi dan juga militer. Negara negara besar telah banyak menggunakan pendekatan geostrategis dalam kebijakan luar negrinya, terutama dalam membuat strategi militer.

3. METODE PENELITIAN

Peneltian ini mengaplikasikan metode penelitian eksplantif. Penelitian eksplanatif itu sendiri merupakan penelitian yang berfokuskan dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel yang dijadikan penelitian.

Metode ini dipakai sebagai alat analisis dalam melihat bagaimana permasalahan yang ada di LCS bisa memberikan dampak terhadap Indonesia dari sisi diplomasi, ekonomi maupun kebijakan luar negri Indonesia itu sendiri. Metode eksplanatif dianggap efektif karena peneletian ini bukan hanya menggambarkan secara kasar mengenai apa konflik yang sedang terjadi, tetapi juga memaparkan secara mendetail bagaimana fungsi dan mekanisme serta akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut pada keamanan maritim Indonesia. Melalui penelitian eksplanatif, peneletian ini bisa menyaring penyebab, dan cara pemerintah Indonesia bereaksi terhadap dinamika yang terjadi di kawasannya. Data di penelitian ini didapatkan melalui studi yang mencakup jurnal ilmiah, serta pemberitaan media bersifat kredibel.

Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan hubungan antara konflik regional dan kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional kawasan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Sejak beberapa tahun belakangan, Indonesia sendiri telah melakukan tindakan strategis. Indonesia memulai sebuah *workshop* yang berfokus pada penanganan konflik berpotensi pada Laut China Selatan pada tahun 1990 tersebut. Lalu setelah itu di tahun 2002, negara kita juga memimpin penyatuan DOC alias *Declaration on the Conduct of Parties* pada Laut China Selatan itu. Sejak itu, pemerintah mulai aktif menodongkan negara-negara yang bermasalah untuk menyetujui hukum di LCS. (Toruan, 2020)

Saat perundingan konflik di LCS Indonesia sebenarnya tidak termasuk dalam negara utama yang memiliki masalah dengan Tiongkok. Namun klaim Sembilan garis putus putus yang melintasi Setengah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia menimbulkan ikut-adil nya Indonesia dalam permasalahan Laut China ini. Klaim sepihak Tiongkok ini memantik ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok, walaupun secara hukum kelautan atau yang tertulis dalam UNCLOS klaim dari Tiongkok tidak disahkan secara hukum.

Dalam menanggapi konflik LCS Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat secara langsung menggunakan metode diplomatik yang cenderung netral namun tetap menjaga kedaulatannya. Pemerintah di Indonesia terus menyerukan bahwa Indonesia bukan merupakan pihak yang berkonflik di Laut China Selatan. Tetapi ini Indonesia dengan keras tetap menolak klaim *Nine Dash Line* yang berlawanan dengan aturan UNCLOS. Dalam berbagai pertemuan internasional Indonesia terus menegaskan bahwa daerah Laut di Natuna adalah termasuk wilayah ZEE Indonesia. Pernyataan sepihak ini berdampak cukup signifikan ke bagian ketahanan dan keamanan Indonesia. Keamanan bangsa bisa terganggu karena adanya masalah ini. Dengan itu bangsa ini akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang tidak berdaya karena tidak mampu melindungi kawasannya sendiri. Lebih parah lagi, akibat dari masalah ini adalah rasa percaya masyarakat atas pemerintah akan terkikis. Serta menjaga NKRI yang merupakan salah satu tujuan negara menjadi terhambat dan tidak berproses sesuai harapan. (Pratiwi, 2017)

Dalam konteks diplomatik Indonesia juga ikut aktif dalam penyusunan *Code of Conduct* (COC) antara para negara di Asia Tenggara dan juga Tiongkok sebagai pengikat dari peraturan perilaku di LCS. Masalah di LCS Dalam masa lalu perumusan konflik Laut Cina Selatan, perjuangan dari Indonesia bermula pada saat akhir 1980-an. Saat insiden peperangan Karang Johnson dengan negara Tiongkok, juga dengan negara Vietnam belum terjadi pada tahun 1988. Tetapi negara Indonesia memaksimalkan usaha diplomasi jalur II agar dapat menjembatani semua pihak yang terlibat di permasalahan. Pada waktu itu, Indonesia menerima dukungan

salah satunya yaitu dari Kanada melalui dua universitas nya yaitu dengan cara menyelenggarakan lokakarya. Pertemuan diadakan pada tahun 1990 memanggil semua negara yang berkonflik, termasuk China. (Laksmi, 2022) Melalui metode diplomatis ini, Indonesia berusaha untuk menjadikan wilayah Laut China Selatan tetap menjadi Kawasan yang aman.

Indonesia juga menggunakan forum multilateral untuk membuka kerja sama dalam bidang maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai andil besar dalam keamanan laut, Indonesia menggunakan UNCLOS sebagai dasar hukum dalam mengesahkan batas-batas kedaulatan wilayah. Ketaatan Indonesia terhadap hukum menjadi pilar dari posisi Indonesia di konflik Laut China Selatan, dengan mimpi konflik dapat diselesaikan melalui jalur damai tanpa kekerasan.

Secara garis besar posisi Indonesia dalam masalah Laut China Selatan itu sendiri ialah Indonesia berdiri netral namun dengan catatan Indonesia dengan tegas menjaga kedaulatannya dan juga keamanan maritimnya. Serta Indonesia menggunakan diplomasi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di LCS.

Dampak langsung dari Intensitas pada Laut China Selatan Terhadap Keamanan Maritim Indonesia

Permasalahan di LCS memberikan dampak yang lumayan terasa untuk Indonesia walaupun Indonesia sendiri bukan lah sebagai negara yang bermasalah secara langsung terhadap konflik ini, namun tetap saja Indonesia merasakan sebagian dampak yang ditimbulkan dari konflik ini.

Beberapa dampak yang diberikan oleh konflik ini disebabkan terutama oleh klaim sepihak Tiongkok yaitu klaim *Nine Dash Line* yang menumpang tindih kan wilayah milik Indonesia yaitu kepulauan Natuna. Salah satu dampak yang dihasilkan dari konflik Laut China Selatan ini ialah terancamnya kedaulatan maritim Indonesia, ini disebabkan oleh adanya kapal-kapal dari Tiongkok di wilayah ZEE milik Indonesia yang jelas melanggar kedaulatan Indonesia itu sendiri. Permasalahan ini jelas menimbulkan percikan konflik antara Indonesia dan Tiongkok di pulau Natuna dan memantik Indonesia untuk memperkuat patrol militer di wilayah sekitar.

Konflik ini juga berdampak pada Indonesia yang kesulitan untuk menjalankan hukum Laut internasional atau UNCLOS walau Indonesia ingin bersifat tegas dengan mengikuti hukum UNCLOS lemahnya sanksi-sanksi yang diberikan membuat masalah kian rumit. Konflik yang terjadi di Natuna juga berdampak buruk pada kepulauan Natuna itu sendiri salah satu dampak buruk yang dirasakan oleh kepulauan Natuna itu sendiri ialah meningkatnya penangkapan ikan ilegal, ketegangan yang terjadi di kepulauan Natuna membuka celah bagi

kapal kapal asing untuk melakukan tindakan illegal terhadap sumber daya alam yang terletak di Natuna yang jelas memberi dampak buruk bagi Natuna itu sendiri baik secara ekosistem keLautan yang rusak maupun perekonomian nelayan lokal yang melemah.

Indonesia juga terdampak dalam hal kekuatan diplomasi dimana Indonesia dianggap tidak tegas dalam menyikapi yang terjadi di LCS, dalam sisi kerjasama Indonesia dan Tiongkok, Indonesia sebagai mitra dagang ikut terancam semua ini adalah dampak dari isu terjadinya pada di area Laut China Selatan. Kejadian Isu yang terletak pada Laut China Selatan juga berpotensi dalam menurunkan perhatian investor yang datang ingin menanamkan investasi di sektor kemaritiman di pulau Natuna karena ke tidak jelasan permasalahan hukum dan potensi dari konflik bersenjata menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka ke Indonesia.

Dampak dampak dari konflik di Laut China Selatan jelas menimbulkan banyak kerugian terhadap Indonesia baik dari segi ekonomi, militer, diplomasi maupun masyarakat lokal itu sendiri. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang berkonflik secara langsung dengan permasalahan ini namun tetap saja Indonesia terkenda dampak dampak yang timbulkan dikarenakan Sebagian wilayah ZEE Indonesia terkena klaim dari *Nine Dash Line* dari Tiongkok.

Dampak dampak diatas memperlihatkan pentingnya Indonesia untuk bisa beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi pada sekitar yang terus berkembang agar kedaulatan Indonesia di mata dunia tidak melemah dan juga Indonesia harus tetap mempertahankan Hukum keLautan dan tetap tegas kepada Tiongkok sembari tetap menjaga hubungan regional dengan Tiongkok agar tidak renggang walau sedang berkonflik.

Ancaman Terhadap Keamanan Maritim Indonesia

Ancaman paling serius yang dihasilkan dari konflik Laut China Selatan ialah ancaman dari sektor kemaritiman. Dari melihat tema dari konflik ini sudah jelas area yang paling terasa dampaknya ialah area maritim yang dimana disitulah titik konflik terjadi. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan jelas menimbulkan banyak ancaman bagi kemaritiman Indonesia, ancaman yang tentu bisa merusak baik secara ekonomi maupun kedaulatan.

Salah satu bukti yang paling nyata dari ancaman konflik Laut China Selatan ini ialah dilanggarnya ZEE Indonesia di kepulauan Natuna yang dimana konflik ini melanggar hukum batas Laut UNCLOS yang telah diresmikan pada 1982. Pelanggaran ini terjadi karena kapal kapal dari Tiongkok baik itu kapal ikan maupun penjaga pantai menoreh masuk ke wilayah Indonesia, bahkan kapal kapal ini mendapat penajagaan dari kapal militer Tiongkok.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal kapal dari Tiongkok bukan satu kali terjadi melainkan sering kali bahkan sampai menimbulkan konflik secara langsung dengan TNI-AL Indonesia. Tentu jenis pelanggaran ini sangatlah mengancam kedaulatan negara dan juga membahayakan kestabilan kawasan dan membuat potensi konflik memanas.

Konflik di Laut China Selatan juga diperparah dengan masalah *illegal fishing* ketika Tiongkok melanggar peraturan ZEE dengan meluncurkan kapal ikan dan kapal penjaga pantai kegiatan pemancingan illegal pun ikut melonjak. Kawasan wilayah Natuna menjadi zona merah *illegal fishing*, dengan munculnya kapal kapal dari Tiongkok yang dilindungi militer. Kegiatan ini mengakibatkan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia serta merusak alam Lautan. Banyak kapal yang telah didiskualifikasi oleh tim *anti illegal fishing* karena melakukan pelanggaran, menunjukkan ancaman besar terhadap wilayah sekitar ALKIII dari kegiatan nelayan ilegal, yang dapat menyebabkan kerugian tahunan lebih dari Rp.300 trilyun. Dengan menggunakan ALKI, kapal-kapal asing itu dapat dengan bebas melakukan penangkapan ikan secara illegal. Berbagai pelanggaran seperti ABK yang tak memiliki surat dan juga kapal yang membawa bahan bakar illegal banyak ditemukan. (Harris, 2022) Kegiatan ini juga menekan nelayan lokal yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kemaritiman. Nelayan merasa tidak untuk berlayar karena takut bertemu dengan kapal Tiongkok.

Konflik Laut China Selatan juga membukakan celah bagi kejahatan laut yang makin sulit dikontrol. Kejahatan seperti penyelundupan barang dan manusia yang terjadi saat negara mengalihkan pandangannya ke konflik, celah inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Kejahatan lain seperti pengiriman narkoba melalui laut pun kerap kali terjadi karena memanfaatkan situasi panas yang sedang berlangsung di Laut China Selatan yang memang pada dasarnya sudah menjadi jalur penyelundupan narkoba namun diperparah dengan adanya konflik yang terjadi. Masalah yang sudah terjadi di atas makin dibuat parah oleh ketidakseimbangannya kapasitas Petugas penegak hukum di Laut. Indonesia memiliki laut yang sangat luas namun disamping itu jumlah personil serta fasilitas yang tersedia belum mencukupi untuk menggapai semua wilayah terutama wilayah yang bermasalah seperti kepulauan Natuna.

Koordinasi antar personil sering menjadi masalah dalam merespon setiap pelanggaran. Saat kapal Tiongkok masuk ke wilayah Indonesia butuh kesiapan yang cukup untuk meluncurkan aksi dari penegak hukum itu sendiri. Ini menimbulkan pandangan bahwa Indonesia masih butuh banyak persiapan untuk menjaga kedaulatannya di laut secara efisien.

Ancaman maritim yang berlangsung di Indonesia pada momen ini dan juga akan mempengaruhi pada kejadian yang akan datang juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika-

dinamika yang terjadi di LCS. Walaupun Indonesia itu sendiri bukan merupakan pemeran yang bersentuhan secara langsung dengan konflik di LCS itu sendiri, namun tetap saja dampaknya pada sektor maritim terutama pulau Natuna sangat terasa. Pelanggaran kedaulatan Indonesia, *Illegal fishing*, kejahatan Laut merupakan sekian dampak yang terjadi di sektor kemaritiman. Oleh sebab itu, Indonesia harus mempertegas keamanan maritim yang bersifat multifungsional baik itu dari sisi hukum, sosial maupun ekonomi. Melindungi sektor maritim bukan hanya soal menjaga keamanan nya melainkan juga menjaga kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal disana.

Dampak Konflik Terhadap Stabilitas Regional Dan Ekonomi Maritim

Konflik yang terjadi di LCS tidak hanya berakibat pada negara negara yang langsung berkonflik dalam klaim wilayah, melainkan memiliki efek yang luas terhadap stabilitas Kawasan Asia Tenggara dan ekonomi sektor maritim negara sekitarnya tanpa kecuali Indonesia. Konflik geopolitik yang terjadi di wilayah ini membuat suatu dinamika yang mengintervensi keamanan dan kerja sama regional. Gangguan ini dapat mengganggu stabilitas regional dan perekonomian global. Pengaruh dari luar di Konflik LCS membuat banyak negara resah. Intervensi dari negara lain bisa saja menambah masalah di wilayah tersebut. (Tambunan, 2025)

Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan pemilik wilayah yang strategis mendapati negaranya menghadapi dua tantangan besar yaitu menjaga stabilitas internal sambil mengendalikan ketegangan geopolitik regional. Konflik di LCS mengakibatkan ketegangan politik sesama negara anggota ASEAN yang di karenakan perbedaan pendapat. Beberapa negara seperti filipina secara terang terangan menentang klaim Tiongkok atas Laut China Selatan sementara negara lain seperti kamboja dianggap lebih mendukung Tiongkok karena kedekatan ekonomi dan politik. Berbedanya pendapat ini menimbulkan keretakan di tubuh ASEAN dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi ketidaksanggupan ASEAN dalam menyepakati satu suara membuat forum tidak kondusif. Hal ini berpotensi meretakan peran ASEAN sebagai organ utama dalam stabilitas regional. Kehadiran tentara Tiongkok di wilayah LCS pun ikut memperkeruh stabilitas politik regional. Tiongkok mengklaim 90% wilayah LCS.

Negara Indonesia dan juga berbagai negara negara terletak di Asia Tenggara berada dalam posisi terjepit dikarenakan di satu sisi mereka harus tetap menjaga hubungan ekonomi yang baik dengan Tiongkok. Pada saat yang sama suara dari Amerika Serikat ikut memperkeruh suasana diplomatik.

Meningkatnya kegiatan militer di Kawasan LCS adalah salah satu akibat paling mencolok dari masalah di LCS. Tiongkok telah menciptakan basecamp militer di beberapa pulau buatan. Disamping itu, karena adanya Angkatan Laut AS dan negara lain semakin memperlihatkan atmosfer militer di sekitar kawasan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran dari Indonesia akan terjadinya konflik senjata.

LCS juga sebagai salah satu jalur pelayaran terefektif. Sekita 60% Indonesia melewati wilayah ini, menjadikannya penting untuk keberlangsungan ekonomi negara dan global. Konflik di LCS menimbulkan ketidakjelasan hukum dan keamanan di jalur ini yang disebabkan oleh militer dan potensi terjadinya konflik antara kapal dari negara negara lain. Hal ini menyebabkan biaya asuransi dari kapal melonjak dan mengintervensi jadwal logistik. Konflik di Laut China Selatan juga memperlambat masuknya investasi dalam sektor maritim. Investor lebih memilih mencari wilayah yang tidak berkonflik dan stabil. Saat wilayah perairan Indonesia dianggap sudah terdampak oleh konflik di Laut China Selatan minat dari investor itu pun menurun.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat luas dalam ekonomi maritim seperti perikanan, pariwisata. Namun, stabilitas regional yang goyah membuat kadang sektor ini sulit untuk berkembang secara maksimal. Konflik di Laut China Selatan juga memperlambat kerja sama antar negara negara dalam urusan kemaritiman. Masyarakat lokal di kepulauan Natuna menjadi kelompok yang sangat terdampak pada konflik ini. Adanya kapal kapa lasing yang memiliki senjata di wilayah mereka jelas membuat mereka terintimidasi. Ini mengakibatkan pendapatan mereka pun ikut menurun. Ketegangan di Laut China Selatan memperburuk ketimpangan pembangunan pusat dan juga pesisir. Saat pemerintah mengutamakan Pembangunan militer di wilayah tersebut, warga lokal pun merasa terabaikan dari sisi kesejahteraan hidup.

Indonesia mendorong pembuatan *Code of Conduct (COC)* untuk negara negara ASEAN dan Tiongkok agar bisa menangani konflik di LCS. Pengaplikasian CoC sangat efektif dalam menekan konflik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. CoC memiliki aturan yang dapat mempengaruhi keketatan pada setiap negara yang terlibat pada wilayah LCS. (Prayuda, 2020) Proses ini memakan waktu yang lama karena perbedaan pendapat.

Konflik Laut China Selatan memiliki efek yang cukup terasa terhadap stabilitas regional dan ekonomi maritim, Baik itu Indonesia maupun negara lainnya. Gangguan politik, melonjaknya aktivitas militer, serta gangguan di jalur pelayaran merupakan beberapa efek yang terasa. Untuk Indonesia, situasi ini menimbulkan respon yang detail mencakup diplomasi, pertahanan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan juga memperhatikan nasib

masyarakat pesisir. Masa depan ekonomi dan stabilitas Kawasan maritim Indonesia berpegangan pada kekuatan negara dalam mengendalikan konflik ini tanpa terjatuh dalam konflik dan kepentingan nasional.

Upaya Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim

Konflik LCS menciptakan sebuah masalah bagi Indonesia, terutama dalam mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), melindungi kedaulatan di kawasan Natuna, melindungi para nelayan lokal dan menjaga maritim Indonesia itu sendiri. Kurangnya sarana dan teknologi yang dibutuhkan Indonesia untuk mengawasi kedalaman lautan, serta kekurangan lembaga Pemerintah tidak bekerja sama dengan baik. Dijelaskan bahwa penerapan hukum laut internasional (UNCLOS) menimbulkan masalah karena masing-masing pihak memberi interpretasi yang berbeda.

Indonesia menghadapi masalah besar dengan kekurangan dana dan tenaga kerja yang mendukung posisinya sebagai penengah di kawasan. Ini karena Indonesia membutuhkan dana dan tenaga kerja ahli untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, rencana yang menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kemampuan maritim, peningkatan diplomasi, koordinasi yang lebih baik, kemajuan teknologi, dan kerja sama dengan negara lain. (Akmal)

Indonesia telah menjalani berbagai Upaya baik melauli militer, diplomatik maupun hukum. Indonesia secara tegas berpegang teguh pada hukum Laut yaitu UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum internasional yang mengatur semua perbatasan dari Laut Laut. Indonesia juga dengan tegas tidak membenarkan klaim dari pihak Tiongkok mengenai *Nine Dash Line* dikarenakan klaim tersebut melanggar dasar hukum Laut. Dalam banyak forum internasional Indonesia berungkali menekankan pentingnya untuk menghormati UNCLOS dan menekan untuk penyelesaian dari Konflik Laut China Selatan bukan melalui kekuatan militer.

Sebuah landasan yang kuat diperlukan untuk menentukan batas maritim antar negara karena *role* yang di mainkan laut pun bertingkah sebagai aktor penting dari sudut pandang tingkat keamanan, ekonomi, dan politik. Pada konvensi PBB terkait pada isu hukum laut yang diusulkan pada tahun 1982, merupakan landasan hukum yang sempat digunakan untuk menangani keterbatasan maritim yang ada. Konvensi tersebut akhirnya mengusulkan sebanyak 320 pasal serta sebanyak 9 lampiran, dan mengatur hampir semua aktivitas dan masalah yang berkaitan dengan laut. Salah satu contohnya adalah pembentukan zona-zona maritim dengan spesifikasi tertentu, seperti zona-zona maritim dengan spesifikasi tertentu. (Kaunang)

Indonesia bukanlah aktor utama dalam konflik Laut China Selatan akan tetapi Indonesia sebagai negara yang terdampak tetap bersikap proaktif dalam menjaga keamanan nasional.

Pemerintah menekankan bahwa wilayah Indonesia tidak boleh dikalim oleh pihak lain, walaupun begitu tetap saja kapal kapal dari Tiongkok menerobos masuk ke wilayah ZEE Indonesia yang menimbulkan percikan konflik dengan Tiongkok. Indonesia secara tegas berpedoman pada prinsip hukum Laut UNCLOS 1982 sebagai patokan Indonesia terus memperjuangkan haknya di berbagai forum internasional seperti di ASEAN, PBB dan banyak forum internasional lainnya.

Sejak awal 1990-an, kebijakan luar negeri Indonesia terus berusaha mencari cara untuk mengurangi kemungkinan konflik di perairan. Salah satunya ialah mengikuti workshop untuk meminimalisir konflik dengan mengadakan Kerjasama untuk para negara pengklaim. Indonesia juga berhasil meyakinkan negara negara pengklaim untuk menyepakati DOC pada tahun 2002. Perjanjian ini dimulai pada tahun 1999. (Prabowo, 2013) Indonesia juga sebagai perintis dari komunitas keamanan ASEAN menjadi jawaban untuk menertibkan kawasan LCS lewat jalur diplomasi. (Nugraha, 2021) Beberapa usaha diplomatik juga telah dilakukan oleh Indonesia seperti pemanggilan duta besar.

Keamanan maritim juga membuat pemerintah untuk mengembangkan sektor militer seperti persenjataan terutama ke Angkatan Laut. Langkah seperti pembelian kapal tempur baru dan penambahan armada di sektor wilayah Natuna merupakan salah satu contoh dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan maritim dari sektor militer. Untuk memperkuat pertahanan Natuna, Angkatan laut, darat, serta udara dari negara Indonesia pun merancang sebuah ide. Pihak militer mengatakan bahwa kelompok Angkatan laut itu yang berada pada area Natuna akan diperkuat dengan tambahan satu batalion. Namun, kejadian pada tahun 2016, Angkatan Darat akan menjumlahkan sebanyak 800 tentara di Natuna. Di daerah itu juga akan ada pesawat tempur dari Angkatan Udara. (Maujana Saragih, 2018) Tentu saja keamanan maritim merupakan salah satu titik pusat dari kedaulatan sebuah negara. Di tengah memanasnya konflik di LCS, negara Indonesia akhirnya melakukan berbagai cara untuk menjaga kedaulatan Lautnya baik dengan militer, hukum, maupun diplomasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik LCS merupakan salah satu isu masalah yang rumit di kawasan asia Tenggara, yang mengikutsertakan bermacam negara dengan pandangan politik yang berbeda. Indonesia sendiri merupakan pihak yang secara langsung ikut serta dalam permasalahan yang terjadi di LCS itu sendiri posisi geografis dari Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan wilayah konflik membuat Indonesia terkena dampak dari sisi kemaritiman. Indonesia sebagai negara yang patuh pada prinsip dari dasar hukum laut yaitu UNCLOS 1982 dengan tegas menolak atas

klaim sepihak yang dilakukan pihak asing. Konflik ini juga membawa dampak yang secara langsung.

Hal ini membuat Indonesia untuk memperketat penjagaanya di sektor maritim khususnya kepulauan Natuna. Konflik ini juga berdampak ke stabilitas regional dan ekonomi Indonesia. Indonesia telah mengusahakan berbagai upaya untuk me renovasi kekuatan militer, infrastruktur di wilayah terdampak, dan penambahan armada. Pemerintah juga mengusahakan pemberdayaan Masyarakat lokal dan memberikan edukasi. Setelah semua masalah yang dihadapi, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk berperan sebagai penengah konflik.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A. (n.d.). Strategi Indonesia menjaga keamanan wilayah perbatasan terkait konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2009-2014. Jom Fisip.
- Astarini, R. S. (2021). Siber intelijen untuk keamanan nasional. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 703-709.
- Fasyehhudin, M. F. (2023). Hak berdaulat pemerintah Indonesia dalam memberikan penamaan Laut Natuna menurut hukum internasional (Laut Natuna Utara vs. Laut Cina Selatan). *Gorontalo Law Review*, 6(1), 113-120.
- Harris, A. S. (2022). Strategi pertahanan laut dalam rangka ancaman keamanan di alur laut kepulauan Indonesia II. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 325-331.
- Kaunang, R. B. (n.d.). Penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (perairan Natuna Utara) sebagai kawasan klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, 10(1).
- Laksmi, L. G. (2022). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225-242.
- Maujana Saragih, H. (2018). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan. *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*.
- Nugraha, O. N. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 24-42.
- Prabowo, E. E. (2013). Kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia (studi kasus konflik di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), 118-129.
- Pratiwi, Y. (2017). Posisi Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. *DEFENDONESIA*, 2(2), 35-44.
- Prayuda, R. (2020). Analisis implementasi konsep COC (Code of Conduct) dalam penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4(2), 137-150.

- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1).
- Sarjito, I. A. (2023). Geopolitik dan geostrategi pertahanan: Tantangan keamanan global. *Indonesia Emas Group*.
- Tambunan, K. A. (2025). Dampak konflik di Laut China Selatan terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(01), 231-245.
- Toruan, G. (2020). Peran strategis Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan dalam perspektif stabilitas keamanan regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111-129.